

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan sebuah Teknologi Informasi (TI) berkembang sangat pesat sehingga memberikan banyak kemudahan-kemudahan pada berbagai macam kegiatan bisnis/usaha, seperti kegiatan yang biasanya dilakukan secara manual sekarang dengan adanya perkembangan Teknologi dilakukan menggunakan Aplikasi komputer atau sebuah sistem komputerisasi lainnya. Semakin meningkatnya perkembangan saat ini penyelesaian bermacam transaksi dalam perusahaan publik/ non publik baik itu transaksi keuangan dan non keuangan semakin memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi, dimana dengan adanya teknologi informasi yang ada diharapkan mampu memberikan daya guna kepada para pengguna nya yaitu membantu dalam proses penyelesaian suatu tugas/ pekerjaan.

Tingkat kegunaan pengguna (*User Usability*) merupakan istilah yang menunjukkan kemudahan manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh pegawai perusahaan atau instansi Pemerintahan. Implementasi teknologi informasi di dalam perusahaan terdapat banyak faktor-faktor yang sangat berpengaruh di dalamnya, yaitu pengguna komputer, dukungan dari manajemen, transfer pengetahuan dari konsultan teknologi informasi sendiri, desain bisnis proses, struktur organisasi dan budaya yang ada pada perusahaan. Meskipun keuntungan dari sistem teknologi informasi bisa dilihat secara signifikan dan jelas, namun biaya dari penerapan sistem teknologi informasi ini sangat besar. Banyak implementasi teknologi informasi yang memakan lebih banyak waktu dan biaya untuk mencapai level kesuksesan tertentu. Penerapan teknologi yang telah berhasil dapat dimanfaatkan oleh pengguna secara maksimal dan berguna bagi efektifitas

dan efisiensi kerjanya. Namun saat penerapan teknologi informasi sudah selesai maka perlu dilakukan pengembangan berupa penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan terbaru dari pengguna di perusahaan. Bila tidak dilakukan pengembangan yang secara terus menerus akan terjadi perbedaan realita dengan sistem komputer yang digunakan sehingga makin lama akan mengakibatkan ketidaksesuaian semakin tinggi dan akhirnya informasi yang diberikan oleh sistem tidak akan bermanfaat sama sekali terhadap manajemen perusahaan. Efektifitas dari sebuah teknologi informasi tergantung pada pengetahuan dan kemampuan dari pengguna untuk menggunakannya. Penggunaan teknologi informasi di organisasi sangat fleksibel terutama pada interaksi antar karyawan, proses kerja dan pemanfaatan teknologi. Pada umumnya, orang memandang teknologi informasi dapat digunakan untuk memecah masalah, menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, dan memudahkan penyelesaian tugas. Namun, jika teknologi tersebut tidak bermanfaat dan handal serta yang diwujudkan dengan biaya tinggi, apabila diterapkan akan banyak menghasilkan hal negatif dan berpengaruh kepada pemakai yang pada akhirnya aktifitas mereka terganggu dan kinerja yang diharapkan tidak tercapai.

Pada tingkat Pemerintah Daerah reformasi pengelolaan keuangan ini terus berlanjut dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang mengharuskan penyajian anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (Abdul Hafiz Tanjung, 2008: 2).

Namun setelah diberlakukannya peraturan tersebut, pada pemeriksaan pada tahun 2006 oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap 480 laporan keuangan pemerintah hasilnya sangat mengecewakan. Dari sejumlah itu hanya ada tiga daerah yang menyandang opini paling tinggi atau wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangannya. Bahkan di beberapa daerah telah terindikasi adanya praktik korupsi dengan berbagai modus. Dari hasil pemeriksaan BPK diatas bisa disimpulkan bahwa masih

banyak daerah yang performansinya buruk karena tidak mematuhi aturan dan standar pelaporan keuangan. Disinilah muncul kebutuhan akan sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem yang memproses data-data keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dibutuhkan untuk para penggunanya. Dengan pertimbangan bahwa selama ini sistem informasi masih dilakukan manual, yaitu mencatat data-datanya pada buku lalu menginputkannya ke excel dan menghitungnya, setelah itu membuat bentuk laporannya di word. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pelaporan sehingga menyulitkan untuk memperoleh informasi yang cepat, tepat, akurat dan dapat di percaya

Ternyata, tingkat dari penggunaan dari suatu teknologi informasi itu sangat dipengaruhi oleh sistem informasi yang di ciptakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri karena pada umumnya Pemerintah Daerah itu diberikan suatu Undang-Undang, aturan tentang bagaimana tata cara pengelolaan keuangan daerah tetapi dalam hal menyusun sistem yang bisa membantu mereka itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing dan kemudian Pemerintah Daerah itu akan menunjuk kembali pengembang-pengembang yang ada. Apabila sistem yang diciptakan oleh pengelolaan keuangan daerah itu ternyata semakin baik maka sistem nya itu akan semakin memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, yang dalam ini lebih kepada kualitas laporan keuangan.

Perubahan yang terjadi dalam dunia Pemerintahan tidak hanya dalam melakukan kegiatan administrasi Pemerintahan, melainkan dalam menjalankan segala aspek kegiatan/aktivitas pemerintahan itu sendiri. Teknologi Informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat karena menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan komputer.

Pemerintah telah menerapkan berbagai upaya untuk menjalankan reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara yang merupakan amanat Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terdapat hubungan yang positif antara investasi teknologi informasi dengan kinerja dan produktivitas, serta mengacu bahwa keuntungan dari investasi teknologi informasi akan dapat dirasakan manfaatnya dalam periode yang cukup lama. Oleh karena itu, sistem teknologi informasi juga telah menjadi komponen yang sangat penting dan luas perannya bagi keberhasilan organisasi tak terkecuali organisasi disektor pemerintahan karena dapat membantu segala jenis kegiatan, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, komunikasi dan kinerja pegawainya. Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, salah satunya dengan cara penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah .

SIPKD dan SIKD adalah sistem yang dibangun untuk mengelola keuangan daerah yang mengacu kepada beberapa regulasi, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No.26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2007, serta regulasi lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hampir seluruh jenis aplikasi yang dipergunakan pasti melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya dipergunakan oleh mereka yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan.

Sesuai dengan fakta di Pemerintahan, mengolah data menjadi seluruh informasi yang nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Jawa Barat khususnya Kota Bandung dalam hal ini

juga telah mengembangkan sistem informasi keuangan yang dinamakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dimana sistem tersebut diharapkan dapat lebih menunjang kerja para pegawainya dalam proses laporan keuangan.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) tersebut dipakai oleh beberapa dinas-dinas Pemerintah Kota Bandung, yang diharapkan sistem tersebut dapat mempermudah pegawainya dalam bekerja. Selain itu juga diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan data-data keuangan yang akan menjadi laporan keuangan daerah. Keberhasilan suatu penerapan sistem informasi yang baik ialah dapat dilihat dari usability terhadap penggunaannya, dimana untuk mengukur sejauhmana efektivitas, efisiensi dan kepuasan pengguna terhadap sistem tersebut. Agar sistem tersebut dapat diperbaiki lebih lanjut sesuai kebutuhan penggunaannya . Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten dan Kota di Bandung Raya telah mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah sesuai dengan sistem pengolahan keuangan daerah yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang baru muncul yaitu dari Peraturan Pemerintah No.24 ke Peraturan Pemerintah No.71 yaitu terdapat perbedaan komponen-komponen yang terdapat dalam satu laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga komponennya antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas( disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. ( <https://bhaskoroperwiro.wordpress.com/2014/11/06/perbedaan-antara-pp-242005-dan-pp-712010-akuntansi-pemerintahan/>)

Penelitian terdahulu yaitu “Peranan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Pendekatan *User Usability* Di Dinas

Pemerintah Wilayah Bandung Tengah Provinsi Jawa Barat’ karya Ulfah Nurfa menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah memiliki peranan terhadap Pendekatan *User Usability*. Penelitian yang saya ambil merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ulfah, namun terdapat perbedaan dari objek penelitiannya yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten dan Kota di Bandung Raya. Saat ini perubahan sistem yang semakin cepat dari Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah dari PP No. 24 Tahun 2005 ke PP No. 71 Tahun 2010 menyebabkan penting sekali melakukan penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: “PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP TINGKAT KEGUNAAN PENGGUNA (USER USABILITY) DI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN DAN KOTA DI BANDUNG RAYA”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten dan Kota di Bandung Raya?
2. Bagaimana tingkat kegunaan penerapan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten dan Kota di Bandung Raya?
3. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap tingkat kegunaan pengguna (User Usability) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten dan Kota di Bandung Raya ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Tingkat Kegunaan Pengguna (*User Usability*) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten dan Kota di Bandung Raya.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten dan Kota di Bandung Raya.
2. Untuk mengetahui tingkat kegunaan pengguna (*User Usability*) penerapan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten dan Kota di Bandung Raya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap tingkat kegunaan pengguna (*User Usability*) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten dan Kota di Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan, peneliti berharap hasil penelitian ini mempunyai berguna sebagai berikut:

#### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam membuktikan secara empiris pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap *User Usability*.

### 1.4.2 Aspek Praktis

#### 1. Bagi Pemerintah Pusat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan dalam regulasi untuk standar minimal dari sistem yang harus ada.

#### 2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai pertimbangan, memberikan kontribusi dalam menentukan penerapan sistem yang efektif, memberikan acuan dalam pemilihan sistem serta memberikan acua dalam perbaikan sistem.